Kementerian Perhubungan
Badan Kebijakan Transportasi

LAPORAN KINERJA 2023

Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda tahun 2022 disusun sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara, mulai dari Eselon II ke atas harus mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pelaksanaan kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Pelaporan kinerja bertujuan memberikan informasi capaian kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas rencana kinerja yang telah diperjanjikan dengan target yang diinginkan untuk tercapai. Penyusunan laporan kinerja Badan Kebijakan Transportasi berpedoman pada petunjuk teknis penyusunan laporan kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Saat ini yang dipertanggungjawabkan bukan hanya LKIP, tetapi SAKIP dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan laporan kinerja ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Laporan akuntabilitas ini dimaksudkan untuk dapat melihat seberapa besar manfaat atau hasil yang dicapai Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kinerja penyelenggaraan Analisis dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan.

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Unit Kerja

Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dipimpin oleh Kepala Pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Kebijakan Transportasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda memiliki tugas melaksanakan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda;
2. Penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda;
3. Penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda;
4. Penyiapan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda;
5. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda;
6. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda; dan
7. Penyiapan pelaksanaan urusan administrasi.

Struktur organisasi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

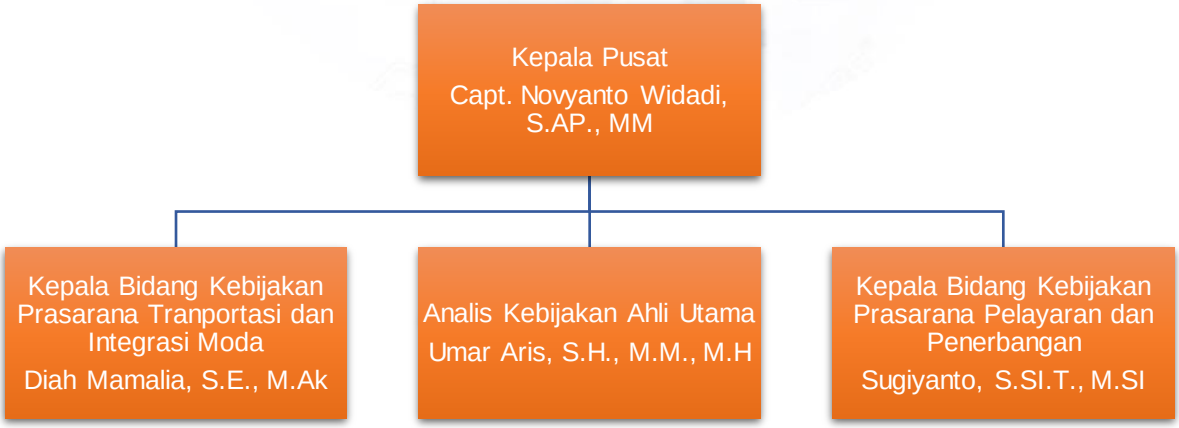

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

Untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut sesuai dengan PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan telah ditetapkan Susunan Organisasi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda berserta fungsinya sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1. Pada struktur organisasi ini terdapat satu jabatan setingkat eselon II, dua jabatan eselon III, dan kelompok jabatan fungsional

1. **Bidang Kebijakan Prasarana Transportasi Jalan, Perkeretaapian, dan Integrasi Moda**

   Bidang Kebijakan Prasarana Transportasi Jalan, Perkeretaapian, Dan Integrasi Moda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pengelolaan manajemen pengetahuan di bidang prasarana transportasi jalan, perkeretaapian dan integrasi moda. Bidang Kebijakan Prasarana Transportasi Jalan, Perkeretaapian, dan Integrasi Moda menyelenggarakan fungsi:

   a) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi jalan, perkeretaapian dan integrasi moda;
   b) penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi jalan, perkeretaapian dan integrasi moda;
   c) Penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang prasarana transportasi jalan, perkeretaapian dan integrasi moda;
   d) penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang prasarana transportasi jalan, perkeretaapian dan integrasi moda;
   e) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang prasarana transportasi jalan, perkeretaapian dan integrasi moda; dan
   f) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi jalan, perkeretaapian dan integrasi moda.

2. **Bidang Kebijakan Prasarana Transportasi Pelayaran dan Penerbangan**

   Bidang Kebijakan Prasarana Transportasi Pelayaran dan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program,

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan, norma, standar, posedur, kriteria, serta pengelolaan manajemen pengetahuan di bidang prasarana transportasi pelayaran dan penerbangan. Bidang Kebijakan Prasarana Transportasi Pelayaran dan Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

a) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi pelayaran dan penerbangan;
b) Penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi pelayaran dan penerbangan;
c) Penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang prasarana transportasi pelayaran dan penerbangan;
d) Penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang prasarana transportasi pelayaran dan penerbangan;
e) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang prasarana transportasi pelayaran dan penerbangan; dan
f) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi pelayaran dan penerbangan

1.3 Sumber Daya Manusia Unit Kerja

Jumlah pegawai Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda sampai 31 Desember 2023 sebanyak 48 orang dengan komposisi pegawai Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda berdasarkan golongan, pendidikan, dan jabaran structural masing-masing dapat dilihat pada Tabel 1.1, Tabel 1.2, dan Tabel 1.3, berikut ini:

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan per 31 Desember 2023

NO.	JENIS GOLONGAN	TAHUN 2022
1.	Golongan IV	7
2.	Golongan III	38
3.	Golongan II	2
4.	Golongan I	-
Jumlah Pegawai		**47**

Sumber: Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Tahun 2023

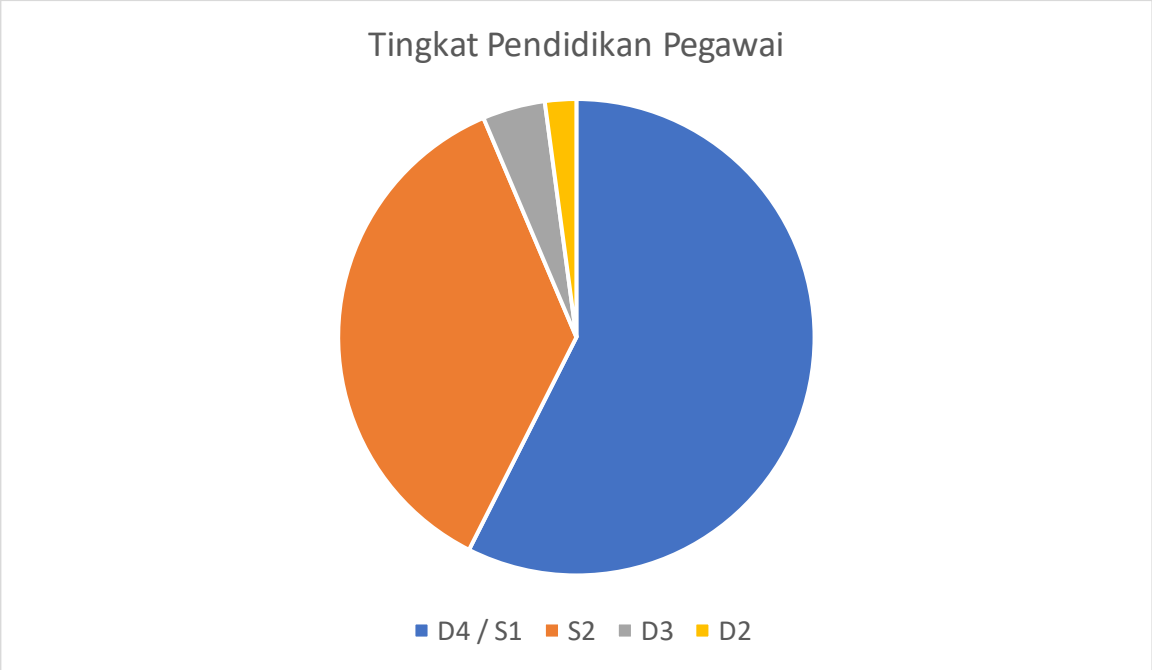

Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum per 31 Desember 2022

NO.	URAIAN	TAHUN 2022
1.	Struktural	3
2.	Analis Kebijakan	23
3.	Perencana	3
4.	Statisi	2
5.	Pranata Komputer	3
6.	Analis Pengelola Keuangan APBN	3
7.	Non Fungsional	10
Jumlah Pegawai		47

Sumber: Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Tahun 2022

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabfung Analis Kebijakan per 31 Desember 2022

NO.	URAIAN	TAHUN 2021
1.	Analis Utama	2
2.	Analis Madya	3
3.	Analis Muda	5
4.	Analis Pertama	14
Jumlah		**23**

Sumber: Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, Tahun 2022

1.4 Potensi, Isu Strategis, dan Permasalahan

Kemampuan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda untuk membangun organisasi yang sehat dan manajemen yang bersih serta transparan sudah dioptimalkan. Keadaan ini tampak dalam efisiensi dan efektivitas pengelolaan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda sebagai lembaga pemberi masukan kebijakan dalam bidang prasaran Transportasi dan Integrasi Moda, namun keterbatasan jumlah pegawai, dan alokasi anggaran menjadi penyebab kurang optimalnya kinerja Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dalam melaksanakan kegiatan kajian kebijakan.

Kegiatan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda yang sudah terselesaikan meliputi beberapa kajian isu strategis diantaranya: Evaluasi Standar Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) berdasarkan Kondisi Pasar Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia; Optimalisasi Stimulus Tarif Angkutan Umum dalam Mendukung Integrasi Moda di Wilayah JABODETABEK; Potensi *Demand* Distribusi Logistik Wilayah Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN); Dukungan Bandar Udara Taufik Kiemas terhadap Pengembangan Pariwisata di Pesisir Barat Lampung; Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Berkeselamatan dan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda juga memiliki kajian terencana diantaranya: Pengembangan Akses Jalur Kereta Api Menuju Pelabuhan dan Bandara; Evaluasi Kebijakan Mekanisme Slot Time Penerbangan; Kebijakan Implementasi Dryport untuk Distribusi Kopi di Provinsi Aceh; Kebijakan penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Udara; Kebijakan Kriteria Bandara Hub and Spoke untuk Optimalisasi Jaringan; Kebijakan Implementasi Remote Tower di Bandara Wilayah 3T; Kebijakan Penetapan Bandara Internasional Transit Hub dan Pusat Perawatan; Kebijakan DLKr dan DLKp Pelabuhan dan Alur Pelayaran; Kebijakan Dukungan Infrastruktur Pelabuhan di Kawasan Ekonomi Khusus; Kebijakan Integrasi Moda di Bandara untuk Mendukung Pariwisata Nasional.

Kelemahan yang dapat diidentifikasi menjadi kendala pelaksanaan kegiatan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda adalah keterbatasan anggaran dan keterbatasan SDM Analis Kebijakan. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuntitas Analisis Kebijakan di bidang Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, ke depannya akan melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi dan tenaga ahli yang sesuai dengan bidangnya untuk diikutsertakan dalam kegiatan analisis kebijakan sebagai

narasumber dan dewan pakar, dengan harapan kemampuan SDM analis kebijakan sekaligus dapat ditingkatkan melalui *sharing* informasi dari narasumber.

1.5 Sistematika Laporan

Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada sub bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator Kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan proses penyusunan rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang akan dilakukan;
2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
3. Realisasi anggaran

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan;
2. Perjanjian Kinerja;
3. Dokumen lainnya yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2022
PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA

2.1 Renstra Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

Dokumen Rencana Strategis Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda mengacu pada Dokumen Rencana Strategis Badan Kebijakan Perhubungan Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui melalui Keputusan Kepala Badan Kebijakan Perhubungan Nomor SK 145 Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Badan Kebijakan Perhubungan untuk periode lima tahun, terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dokumen tersebut disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (RPJM Nasional 2020–2024) sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 Tahap Keempat Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2020.

Dokumen Rencana Strategis Badan Kebijakan Perhubungan menjadi pedoman dan komitmen perencanaan jangka menengah dalam menjalankan kebijakan strategis serta menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di seluruh unit kerja di lingkungan Badan Kebijakan Perhubungan dalam kurun waktu 2020–2024. Rencana strategis dimaksud selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan (*annual performance plan*) yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun dengan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators)* yang relevan.

Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda sebagai unit kerja yang bertugas untuk menyelenggarakan Analisi dan pengembangan di bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda memiliki potensi untuk dapat menjadi pusat unggulan Analisi kebijakan transportasi bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda sesuai dengan fungsi dan kewenangannya secara efektif dan efisien. Termasuk didalamnya adalah merumuskan langkah-langkah secara terarah membentuk tujuan yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dan sasaran kegiatan yang menggambarkan hal yang ingin dicapai dalam setiap perencanaannya.

Permasalahan yang dihadapi selama ini dengan adanya tumpang tindih pelaksanaan Analisi dengan subsektor di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat diantisipasi dengan baik melalui koordinasi antar institusi dalam penyelenggaraan Analisi. Atmosfir transformasi kelembagaan Badan Kebijakan Perhubungan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai program reformasi birokrasi yang mengarah pada Badan Kebijakan Transportasi (BKT) memberikan dampak positif dengan konsep mirroring dimana informasi hasil Analisi yang diolah melalui proses analisis data dan informasi akurat akan membantu memberikan rumusan kebijakan strategis yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak pengambil kebijakan sektor transportasi.

Untuk itu, diperlukan kedekatan komunikasi melalui hubungan tata kerja yang dibangun secara harmonis antara Unit Eselon 1 Badan Kebijakan Perhubungan dan Unit Eselon 2 di Lingkungan Badan Kebijakan Perhubungan dengan para penggunanya, mulai dari Menteri Perhubungan, Unit Eselon 1 dan Eselon 2 di lingkungan Kementerian Perhubungan terutama pada jajaran Ditjen Teknis, dan para Kepala Daerah serta stakeholder terkait yang memerlukan rekomendasi atas evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, yang secara akumulatif akan memberikan hasil optimal capaian kinerja Kementerian Perhubungan. Dalam mencapai target kinerja yang optimal Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda memiliki Visi, Misi, dan Tujuan untuk mencapai sasaran organisasi.

V I S I

Visi dan Misi Badan Kebijakan Transportasi 2020-2024 ditetapkan dengan menyelaraskan Visi dan Misi Kementerian Perhubungan serta memperhatikan berbagai dinamika lingkungan strategis, perkembangan IPTEK, dan kondisi yang diharapkan pada tahun 2020-2024. Didasarkan pada hal tersebut, maka ditetapkan Visi Badan Kebijakan Transportasi sebagai berikut:

"**Badan Kebijakan Transportasi (BKT) sebagai pusat unggulan (*Center of Excellence*) yang terpercaya dalam analisis dan rekomendasi perumusan kebijakan transportasi yang secara cepat, akurat dan manfaat guna mendukung terwujudnya Visi Kementerian Perhubungan dalam mewujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah"**

Dukungan pencapaian Visi Kementerian Perhubungan dan Badan Kebijakan Perhubungan oleh Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dilakukan melalui perannya sebagai penyusun kebijakan bidang transportasi melalui pelaksanaan kegiatan Analisi dan pengembangan bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda.

M I S I

Untuk mendukung tercapainya Visi Badan Kebijakan Transportasi **sebagai pusat unggulan riset kebijakan transportasi yang berkualitas, antisipatif, dan responsif**, ditetapkan Misi Badan Kebijakan Transportasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan harmonisasi kebijakan transportasi secara holistik, integratif, tematik, spesial (HITS).
2. Meningkatkan kualitas rumusan kebijakan transportasi melalui proses analisis dan penyusunan rekomendasi yang berbasis bukti dan ilmu pengetahuan ***(evidence and knowledge-based policy).***
3. Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam proses analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan transportasi.
4. Membangun bisnis proses yang efektif dalam perumusan kebijakan di bidang transportasi.

Penguatan SDM, sarana, prasarana, pendanaan, database, dan kelembagaan dengan dukungan kinerja perencanaan, program, dan penganggaran serta kualitas tata kelola yang efektif dan efisien.

T U J U A N

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari Misi Badan Kebijakan Transportasi dengan memperhatikan Visi. Untuk mewujudkan Misi Badan Kebijakan Transportasi, maka Tujuan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya dukungan Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dalam pemberian rekomendasi kebijakan strategis bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda;

2. Terwujudnya dukungan tata kelola Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikator pada tujuan yang selanjutnya dijabarkan sebagai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pusjak Prasarna Transportasi dan Integrasi Moda tahun 2020-2024 disusun dengan berbasis pada *outcome*. Dimana *outcome* yang dimaksud berasal dari capaian sasaran kegiatan Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda yang telah dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran kegiatan ini dirumuskan dari Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan, Visi, Misi, dan Tujuan Badan Kebijakan Perhubungan serta tujuan Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dengan memperhatikan permasalahan dan rencana capaian pada tahun 2020-2024. Penjabarannya menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *costumer perspective*, internal proses perspective sebagai berikut:

a. Sasaran Program Pertama (SP.1) yang akan dicapai adalah MeningkatnyaKualitas Kebijakan Transportasi;
b. Sasaran Program Kedua (SP.2) yang akan dicapai adalah MeningkatnyaKualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Dalam tataran *internal process perspective* di level unit Eselon II, Sasaran Program Pertama (SP.1) dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK.1) yaitu:

Sasaran Kegiatan yang akan dicapai adalah Meningkatkan Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan, yang diampu oleh Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu sebagai berikut:

IKK 1: Presentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi
IKK 2: Presentase Pemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Transportasi pada (t-2)
IKK 3: Presentase Pemanfaatan Rumusan Rekomendasi Rumusan NSPK (tahun berjalan)
IKK 4: Presentase Pemanfaatan Rumusan Rekomendasi Rumusan NSPK (t-2)

Dalam tataran *internal process perspective* di level unit eselon II, Sasaran Program Kedua (SP.1) dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK.2) yaitu:

Sasaran Kegiatan yang akan dicapai adalah Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan di Bidang Perhubungan, yang diampu oleh Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu sebagai berikut:

IKK 5: Perumusan Kebijakan Transportasi yang Diselaraskan Pada Tahun Berjalan

Dalam tataran *internal process perspective* di level unit eselon II, Sasaran Program Kedua (SP.2) dijabarkan dalam Sasaran Kegiatan (SK.3) yaitu:

Sasaran Kegiatan yang akan dicapai adalah Meningkatnya Birokrasi Badan Kebijakan Transportasi Yang Akuntabel, yang diampu oleh Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, dengan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu sebagai berikut:

IKK.6 : Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi

IKK 7 : Indeks Perencanaan BKT

IKK 8 : Indeks Pengelolaan Keuangan BKT

IKK 9 : Nilai SAKIP BKT

IKK 10 : Indeks Pengelolaan BMN BKT

IKK 11 : Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BKT

IKK 12 : Indeks Penyelenggaraan Perkantoran

Selengkapnya, Peta Strategis Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dengan *Cascading* Lintas Unit Eselon 1 sebagai Proses *Mirroring* dengan Sektor Kementerian Perhubungan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

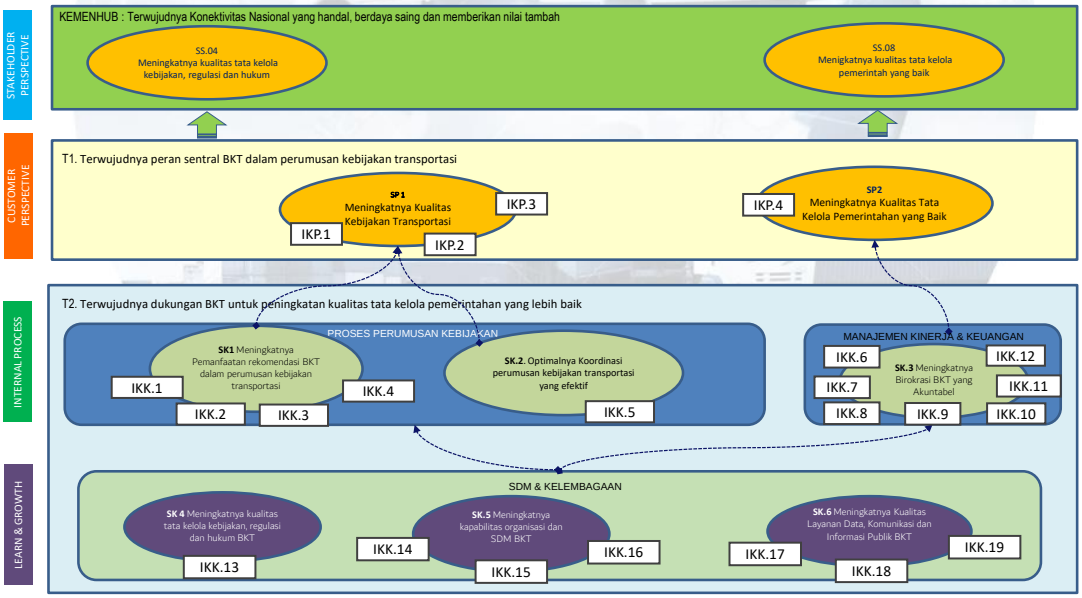

Gambar 2.1 Peta Strategiis Badan Kebijakan Transportasi 2022
(*Sumber: RENSTRA Badan Kebijakan Transportasi 2022-2024*)

Peta strategis tersebut menjadi dasar turunan penyusunan sasaran strategis unit kerja Eselon II di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi. Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Badan Kebijakan Transportasi dapat merepresentasikan kinerja organisasi secara menyeluruh. Sehingga kinerja Pusjak Prasarana dan Integrasi Moda tidak hanya dari keberhasilan pemenuhan kebutuhan *stakeholder* tetapi

juga dalam pengembangan proses bisnis yang efektif dan efisien melalui peningkatan kinerja Analisi itu sendiri, kapasitas SDM, tata kelola dan manajemen organisasi serta anggaran.

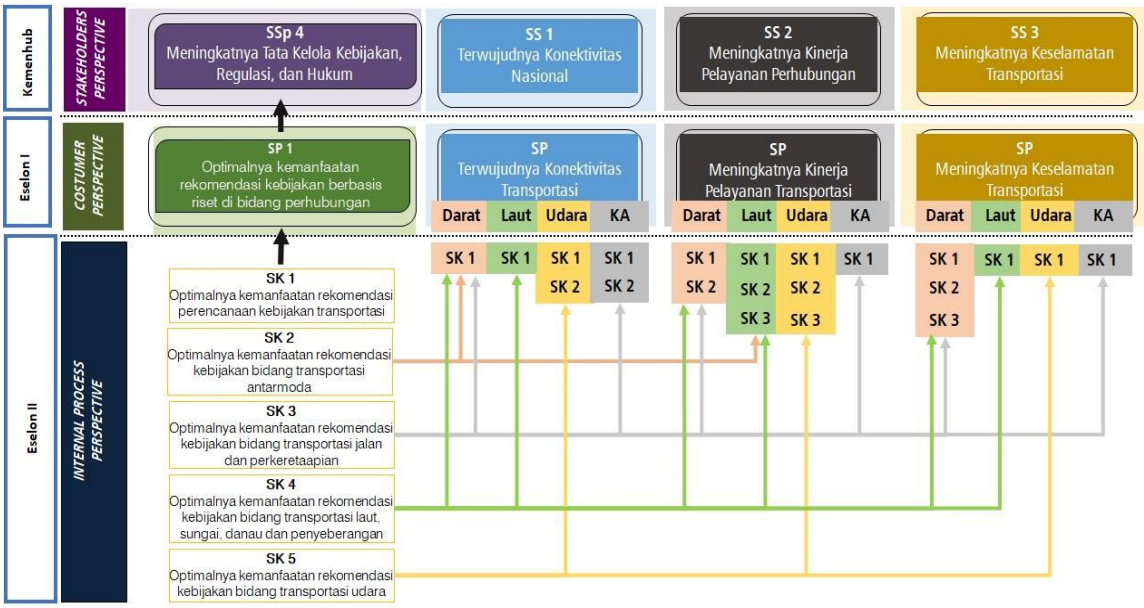

Gambar 2.2 *Cascading* Lintas Unit Eselon 1 sebagai *Proses Mirroring* dengan Sub Sektor Kementerian Perhubungan

Gambar diatas memperlihatkan untuk kelompok *stakeholder perspective*, Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda mengikuti strategi di tingkat Kementerian Perhubungan, pada Sasaran Strategis Penunjang ke-empat (SSp 4) yaitu Meningkatnya Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum dengan Indikator Kinerja Strategis Penunjang ke-empat (IKSp 4): Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum. Selain SSp 4, Pusjak Prasarana Transportasi dan Intgrasi Moda pun mengikuti Sasaran Strategis Penunjang Kementerian Perhubungan yang ke-delapan (SSp 8) yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Hal ini mengingat tugas dan fungsi organisasi, yaitu peran Pusjak Prasarana Transportasi dan Intgrasi Moda sebagai unit kerja penunjang dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Perhubungan.

2.2 Penetapan Perjanjian Kinerja

Target kinerja kegiatan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun secara berjenjang. Adapun penjabaran dari Peta Kegiatan Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dituangkan dalam indikator kinerja kegiatan dan targetnya. Penetapan kinerja pada awal tahun anggaran mengikuti konsep Rencana Strategis Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET
SK 1	Meningkatkan Pemanfaatan Rekomendasi Badan Kebijakan Transportasi dalam Perumusan Kebijakan Transportasi	IKK 1	Presentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Transportasi	%	85
		IKK 2	Presentase Pemanfaatan Rumusan Rekomendasi Kebijakan Transportasi pada (t-2)	%	38
		IKK 3	Presentase Pemanfaatan Rumusan Rekomendasi Rumusan NSPK (tahun berjalan)Isu Strategis di Bidang Transportasi	%	85
		IKK 4	Presentase Pemanfaatan Rumusan Rekomendasi Rumusan NSPK (t-2)	%	32
SK 2	Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Transportasi yang Efektif	IKK 5	Perumusan Kebijakan Transportasi yang Diselaraskan Pada Tahun Berjalan	%	80
SK 3	Meningkatnya Birokrasi Badan Kebijakan Transportasi Yang Akuntabel	IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	3
		IKK 7	Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	84
		IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	88,2
		IKK 9	Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi	Nilai	81
		IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	76
		IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi	%	86
		IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	73

Keterangan: IKK 2 dan 4 akan dilakukan perhitungan pada Tahun 2024

Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda melaksanakan kegiatan Analisis kebijakan terkait isu strategis di sektor transportasi udara. Saat ini, Pusat Litbang Transportasi Udara yang kini menjadi Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda telah menyelesaikan 11 (sebelas) Analisis kebijakan, judul dari Analisis kebijakan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3 Judul Analisis Kebijakan Terencana Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

NO	JUDUL ANALISIS KEBIJAKAN
1	Pengembangan Akses Jalur Kereta Api Menuju Pelabuhan dan Bandara
2	Evaluasi Kebijakan Mekanisme *Slot Time* Penerbangan
3	Kebijakan Implementasi Dryport untuk Distribusi Kopi di Provinsi Aceh
4	Kebijakan penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Udara
5	Kebijakan Kriteria Bandara Hub and Spoke untuk Optimalisasi Jaringan
6	Kebijakan Implementasi Remote Tower di Bandara Wilayah 3T
7	Kebijakan Penetapan Bandara Internasional Transit Hub dan Pusat Perawatan
8	Kebijakan DLKr dan DLKp Pelabuhan dan Alur Pelayaran
9	Kebijakan Dukungan Infrastruktur Pelabuhan di Kawasan Ekonomi Khusus
10	Kebijakan Integrasi Moda di Bandara untuk Mendukung Pariwisata Nasional

Tabel 2.4 Judul Analisis Kebijakan Isus Strategis Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda

NO	JUDUL ANALISIS KEBIJAKAN
1	Evaluasi Standar Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) berdasarkan Kondisi Pasar Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia
2	Optimalisasi Stimulus Tarif Angkutan Umum dalam Mendukung Integrasi Moda di Wilayah JABODETABEK
3	Potensi *Demand* Distribusi Logistik Wilayah Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN)
4	Dukungan Bandar Udara Taufik Kiemas terhadap Pengembangan Pariwisata di Pesisir Barat Lampung
5	Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Berkeselamatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023
PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA

3.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan pencapaian kinerja suatu organisasi melalui upaya-upaya strategis dan operasional yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam rangka pemenuhan visi dan misinya. Akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan atau sebaliknya menjadi kegagalan suatu organisasi. Penilaian akuntabilitas kinerja Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dilakukan melalui pengukuran terhadap capaian kinerja setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dengan cara membandingkan realisasi yang dicapai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang telah melalui proses revisi.

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran. Pengukuran Kinerja diawali dengan identifikasi capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang terbaru dari Perjanjian Kinerja yang diukur tiap bulan, triwulan maupun tahunan. Tahapan pengukuran kinerja saat ini dilakukan menggunakan sistem aplikasi berbasis web, yakni e-performance dengan alamat http://eperformance.dephub.go.id. Aplikasi ini disediakan oleh Kementerian Perhubungan sebagai bentuk monitoring kinerja yang dapat dimanfaatkan oleh setiap unit kerja Eselon I, dan II secara mandiri di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pemanfaatan aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah proses evaluasi capaian target kinerja secara periodik setiap bulannya. Sebagai upaya peningkatan kinerja evaluasi dan monitoring capaian target realisasi, Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda menyusun Rencana Aksi terhadap Perjanjian Kinerja yang dilaporkan tiap bulan yang disusun dalam bentuk kertas kerja dengan berisikan format tabel target dan realisasi kinerja yang dilengkapi dengan evaluasi dan rencana tindak lanjut. Disamping itu, disusun juga laporan evaluasi terhadap program kegiatan yang diukur setiap triwulan sebagai bentuk monitoring kinerja target dan realisasi anggaran. Monitoring capaian kinerja output kegiatan dan anggaran dalam hal ini juga dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja) dengan alamat http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id

dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan aplikasi e-Monev PP 39 dengan alamat http://emonev.bappenas.go.id.

3.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Sesuai dengan sasaran kegiatan Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda, maka target dan realisasi kegiatan Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda tahun 2022 jika dibandingkan dengan target pada revisi Perjanjian Kinerja digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 terhadap Target Revisi PK Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	SATUAN	TARGET	TARGET TAHUN	TARGET TW IV	REALISASI TW IV	CAPAIAN KINERJA
SK 1	IKK 1						
	Tingkat Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perhubungan	%	85	15	13.15	13.15	88
	IKK 2						
	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (t-2)	%	38	8	6	6	60
	IKK 3						
	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (tahun berjalan)	%	85	3	3	3	100
	IKK 4						
	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (t-2)	%	32	0	Penundaan Laporan akan dimulai dilakukan Tahun 2024		
SK 2	IKK 5						
	Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang Diselaraskan pada Tahun Berjalan	%	100	5	4.77	4.77	95
SK 3	IKK 6						
	Tingkat Manuritas SPIP Terintegrasi	Nilai	3	3	3	3	3
	IKK 7						
	Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	84	1	84	84	100
	IKK 8						

	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi	Inde ks	88,2	1	88.2	88.2	100
	IKK 9						
	Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi	Nilai	81	9	81	81	100
	IKK 10						
	Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi	Inde ks	76	1	76	76	100
	IKK 11						
	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi	%	86	0	Kegiatan dipusatkan Disekretariat		
	IKK 12						
	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Inde ks	73	1	73	73	100

Sumber: Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2023

Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja pada tahun 2023 ini telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi IKK 1 s.d 12 tercapai pada Triwulan ke III, hal ini dikarenakan pelaksanaan penyusunan rekomendasi kebijakan dan koordinasi rancangan kebijakan di bidang Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda berjalan sesuai dengan target baik sesuai dengan anggaran maupun kinerja dan pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis berjalan sesuai target baik anggaran maupun kinerja. Adapun Hambatan dikarenakan Proses Pengerjaan RAB dan KAK yang belum maksimal. Deskripsi mengenai capaian untuk setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. PENGUKURAN DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN 1

Sasaran Kegiatan ke-1 adalah Meningkatkan Pemanfaatan Rekomendasi Badan Kebijakan Transportasi dalam Perumusan Kebijakan Transportasi. Pencapaian sasaran kegiatan kesatu diwujudkan melalui 4 (empat) indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu:

1. **IKK 1.** Presentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (tahun berjalan)

   Hasil penelitian yang menjadi bahan masukan/rekomendasi bagi pengambilan kebijakan menjadi indikator untuk mengukur sasaran program optimalnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan di bidang perhubungan. Pada tahun 2022, jumlah penelitian tahun 2020 yang dilaksanakan dengan skema kontraktual dan swakelola

yang ditindaklanjuti rekomendasinya oleh stakeholder terdapat sebanyak 11 (sebelas) laporan, yakni:

a) Pengembangan Akses Jalur Kereta Api Menuju Pelabuhan dan Bandara
b) Evaluasi Kebijakan Mekanisme Slot Time Penerbangan
c) Kebijakan Implementasi Dryport untuk Distribusi Kopi di Provinsi Aceh
d) Kebijakan penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Udara
e) Kebijakan Kriteria Bandara Hub and Spoke untuk Optimalisasi Jaringan
f) Kebijakan Implementasi Remote Tower di Bandara Wilayah 3T
g) Evaluasi Standar Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) berdasarkan Kondisi Pasar Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia
h) Optimalisasi Stimulus Tarif Angkutan Umum dalam Mendukung Integrasi Moda di Wilayah JABODETABEK
i) Potensi Demand Distribusi Logistik Wilayah Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN)
j) Dukungan Bandar Udara Taufik Kiemas terhadap Pengembangan Pariwisata di Pesisir Barat Lampung
k) Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Berkeselamatan.

2. **IKK 2.** Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (t-2)

Kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil rekomendasi analisis kebijakan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda pada tahun 2023 dilaksanakan untuk memantau pemanfaatan hasil-hasil rekomendasi analisis kebijakan yang telah dilaksanakan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda pada tahun t-2 (tahun 2021). Monitoring tindak lanjut hasil rekomendasi analisis kebijakan yang telah dilakukan oleh Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda pada tahun 2023 terdapat 6 (enam) laporan, yaitu:

1) Evaluasi Penyelenggaraan Bandar Udara Internasional di Indonesia;
2) Kebijakan Pemanfaatan dan Pemilihan Sistem Energi Alternatif sebagai Penunjang Operasi Bandara;
3) Perencanaan Penyiapan Ruang Udara di Wilayah Ibu Kota Negara;
4) Pengembangan Aerotropolis di Wilayah Sekitar Ibukota Negara Baru;

5) Strategi dalam Penguatan Kelembagaan Pelaksanaan Kerjasama dan Pengusahaan di Bidang Penerbangan;
6) Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Ekosistem di Sekitar Bandar Udara Untuk Penanggulangan Satwa Liar.

3. **IKK 3.** Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (tahun berjalan)

IKK 3 merupakan capaian penyusunan rekomendasi rumusan NSPK yang dilaksanakan pada Tahun 2023 (initial). Capaian IKK 3 pada Tahun 2023 sebesar 100%. Capaian untuk IKK 3 pada Tahun 2023 telah sesuai target yang telah di tetapkan dengan laporan sebanyak ,yaitu:

a) Kebijakan Dukungan Infrastruktur Pelabuhan di Kawasan Ekonomi Khusus
b) Kebijakan Penetapan Bandara Internasional Transit Hub dan Pusat Perawatan
c) Kebijakan DLKr dan DLKp Pelabuhan dan Alur Pelayaran
d) Kebijakan Integrasi Moda di Bandara untuk Mendukung Pariwisata Nasional

4. **IKK 4.** Presentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (t-2)

Proses pelaksanaan rekomendasi rumusan NSPK (t-2) merupakan capaian hasil pelaksanaan t-2 (intermediate) capaian IKK 4 pada Tahun 2023 belum dapat dilakukan perhitungan karena baru terbentuknya Pusat Kebijakan Sarana Transportasi pada Tahun 2022, sehingga belum ada rekomendasi rumusan NSPK yang dihasilkan oleh Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda pada t-2 atau Tahun 2021.

B. PENGUKURAN DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN 2

Sasaran Kegiatan ke-2 adalah Optimalnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Transportasi yang Efektif. Indikator kinerja kegiatan yang terdapat dalam sasaran kegiatan ke-2 adalah **IKK 5.** Persentase Perumusan Kebijakan Transportasi yang Diselaraskan pada Tahun Berjalan. Terdapat 3 aspek dalam penilaian presentase perumusan kebijakan IKK 5, 3 aspek di maksud adlah sebagai berikut : ek dalam penilaian presentase perumusan kebijakan IKK 5, 3 aspek di maksud adlah sebagai berikut :

a) Koordinasi perencanaan (a)

Koordinasi perencanaan kebijakan & pemetaan isu strategis; dilakukan minimal 2 kali setahun bersama dengan stakeholder terkait (agenda maping dilaksanakan per semester).

b) Koordinasi pelaksanaan (b)

Koordinasi pelaksanaan kebijakan, mencakup kegiatan konsultasi publik, harmonisasi

rancangan kebijakan & sosialisasi kebijakan, dilakukan minimal 5 kali setahun bersama dengan stakeholder terkait (2x konsultasi publik dan sosialisasi rancangan kebijakan) (3 kali harmonisasi rancangan regulasi per 4 bulan yang telah siap ditetapkan)

c) Koordinasi monitoring evaluasi (c)

Koordinasi monitoring, kendali mutu & evaluasi implementasi kebijakan, dilakukan minimal 2 kali setahun, sebagai monitoring dan evaluasi saat rumusan kebijakan.

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan 2 kegiatan Agenda Mapping yaitu Agenda Mapping di Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Lampung, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah. Selain itu telah dilaksanakan juga kegiatan sosialisasi kebijakan di Tulungagung. Serta telah dilaksanakan kegiatan Advokasi Kebijakan di Medan, Sumatera Utara.

C. PENGUKURAN DAN CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN 3

Sasaran Kegiatan ke-3 adalah Meningkatnya Birokrasi Badan Kebijakan Transportasi Yang Akuntabel. Pencapaian sasaran kegiatan kesatu diwujudkan melalui 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan (IKK), yaitu:

1. **IKK 6.** Tingkat Manuritas SPIP Terintegrasi

Pada tahun 2023, berdasarkan hasil penilaian Penjamin Kualitas Kementerian Perhubungan yang dilak Pada tahun 2023, berdasarkan hasil penilaian Penjamin Kualitas Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Perhubungan, Kementerian Perhubungan berhasil mempertahankan nilai SPIP dengan indeks 3 atau terdefinisi sesuai surat Direktur BPKP Nomor PE.09.03/LHP-170/D103/2/2023 Tanggal 13 November 2023.

Berdasarkan hasil Evaluasi SPIP Tahun 2023, telah dilaksanakan upaya perbaikan seperti :

a) Telah dilaksanakan Kick off Meeting Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023.
b) Telah dilaksanakan Bimtek SPIP Terintegrasi Tahun 2023.
c) Persiapan Penyusunan Penilaian Risiko di Lingkungan Pusat Kebijakan Sarana Transportasi.
d) Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko dan Data Dukung Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Pusat

Kebijakan Berdasarkan hasil Evaluasi SPIP Tahun 2023.

2. **IKK 7.** Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi

   Tingkat kesesuaian dan keterpaduan kebijakan perencanaan dan pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang perhubungan merupakan penilaian terhadap aspek kemanfaatan dokumen perencanaan yang terpadu berdasarkan kesesuaian antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, baik lingkup nasional maupun bidang untuk menghindari terjadinya duplikasi dan ketidaksesuaian antara perencanaan, pemrograma, dan penganggaran.

   Indikator untuk menilai kualitas perencanaan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi Perhubungan, antara lain sebagai berikut:

   1. Persentase Kesesuaian sasaran program renstra Unit Kerja Eselon 2 dengan sasaran Badan Kebijakan Transportasi (minimal 1 kali dalam 5 tahun) dengan bobot 20%;
   2. Persentase Kesesuaian sasaran program Renja Unit Kerja Eselon 2 dengan sasaran PN, dalam RKP dengan bobot 40%;
   3. Persentase Kesesuaian sasaran program Renja Unit Kerja Eselon 2 dengan sasaran Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

   Nilai Indeks Perencanaan Pusat Kebijakan Sarana Transportasi mengikuti Nilai Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi dengan Nilai Indeks pada Tahun 2023 sebesar 100%.

3. **IKK 8.** Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi

   Mengadopsi dari Permendagri No.19 Tahun 2020, Pasal 1, Indeks Pengelolaan Keuangan Kementerian Perhubungan adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata Kelola keuangan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.

   Indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi Perhubungan, antara lain sebagai berikut:

   a) Kinerja anggaran dengan bobot 60%;
   b) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40%.

   Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi ,telah mencapai kinerja Indeks 100;

4. **IKK 9.** Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi

   Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result-oriented government).

Penilaian dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB setiap satu tahun sekali atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 dengan komponen dan bobot sebagai berikut:

a) Perencanaan Kinerja, dengan bobot 30%
b) Pengukuran Kinerja, dengan bobot 30%
c) Pelaporan Kinerja, dengan bobot 15%
d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dengan bobot 25%

Realisasi Nilai SAKIP dari Badan Kebijakan Transportasi yang merupakan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP BKT Tahun 2023 sesuai Surat Itjen Nomor PS.307/1/1/ITJEN/2023 Tanggal 30 Agustus 2023. Kegiatan SAKIP Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Tahun 2023;
b) Penyusunan LKIP Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda TA 2022;
c) Penyusunan LKIP Triwulan I TA 2023 Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda;
d) Penyusunan LKIP Triwulan II TA 2023 Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda;
e) Penyusunan LKIP Triwulan III TA 2023 Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda;Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi Bulan Januari TA.2023;
f) Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Bulan Februari TA 2023;
g) Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Bulan Maret TA 2023;
h) Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Bulan April TA 2023;

i) Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Bulan Mei TA 2023;
j) Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Bulan Juni TA 2023;
k) Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Bulan Juli TA 2023;
l) Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Bulan Agustus TA 2023;
m) Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Bulan September TA 2023;
n) Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Bulan Oktober TA 2023;
o) Penyusunan dokumen Monitoring Renaksi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Bulan November TA 2023;
p) Pengisian aplikasi e Performance Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda;
q) Penyusunan Laporan Evaluasi Akhir Periode Renstra;
r) Penyusunan Perjanjian Kinerja Revisi 1 Tahun 2023;
s) Penyusunan Renaksi Tahunan 2023.

5. **IKK 10.** Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi

Indeks Pengelolaan BMN Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda merupakan salah satu indikator dalam rangka mendukung kinerja reformasi birokrasi Kementerian Perhubungan yang pada akhirnya dapat mendorong terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik. Indeks Pengelolaan BMN Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dihitung berdasarkan tingkat pencapaian penetapan status penggunaan (PSP) BMN dan tingkat kepatuhan pelaporan BMN (Laporan BMN Semester 1, Semester 2/Tahunan, dan Laporan Wasdal).

Penilaian Indeks Pengelolaan BMN Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda terdiri dari 2 indikator yaitu Tingkat pencapaian BMN yang dilakukan Penetapan Status Penggunaannya (PSP) (50%) dan Tingkat Kepatuhan Pelaporan terkait BMN (50%). Nilai Pengelolaan BMN Pusat Kebijakan Prasarana

Transportasi dan Integrasi Moda mengacu nilai Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi karena pengelolaan BMN di Kelola oleh Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.

Kegiatan IKK 10 yang telah di laksanakan sampai akhir Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan CaLBMN Tahunan TA 2022 Badan Kebijakan Transportasi;
b. Penyusunan Laporan Wasdal Semester 2 Tahun 2022 Badan Kebijakan Transportasi;
c. Penyusunan Laporan Wasdal Tahunan 2023 Badan Kebijakan Transportasi;
d. Penyusunan Laporan BMN Semester 2 Tahun Anggaran 2022;
e. Penyusunan Laporan BMN Semester 1 Tahun Anggaran 2023;
f. Rapat Finalisasi Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 1156 Tahun 2023 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Badan Kebijakan Transportasi.
g. Rapat Usulan Penghapusan BMN Peralatan dan Mesin dan Optimaliasasi Perawatan Gedung Bangunan;
h. Penysunan Laporan Penualaian Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keunagan dan Penilaian kinerja pengeloalaan BMN Berdasarkan IKPBMN;
i. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2025.

6. **IKK 11.** Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi

7. **IKK 12.** Indeks Penyelenggaraan Perkantoran**,** telah mencapai kinerja Indeks 100.
   a) Operasional dan Pemeliharaan Kantor
      1) Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
      2) Perbaikan Peraladtan Kantor
      3) Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 dan 2
      4) Langganan Daya dan Jasa
      5) Kegiatan Operasional Perkantoran dan Pimpinan
      6) Pembayaran Honor Pramubakti dan Sopir
      7) Pembayaran Honor Pengelola Anggaran

b) Administrasi Perlengkapan dan Kerumahtanggaan Pencegahan Penyebaran Covid-19

c) Administrasi Penyusunan Program

1) Penyusunan dan pembahasan RKA-KL Tahun 2023 Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda
2) Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2023
3) Penyusunan Program dan Perhitungan Biaya Kegiatan Tahun 2023

d) Administrasi Kerjasama Penelitian dan Kajian Isu Strategis

Melakukan kegiatan rekomendasi analisis kebijakan 5 (lima) isu strategis dengan judul sebagai berikut:

1) Evaluasi Standar Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) berdasarkan Kondisi Pasar Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia
2) Optimalisasi Stimulus Tarif Angkutan Umum dalam Mendukung Integrasi Moda di Wilayah JABODETABEK
3) Potensi Demand Distribusi Logistik Wilayah Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN)
4) Dukungan Bandar Udara Taufik Kiemas terhadap Pengembangan Pariwisata di Pesisir Barat Lampung
5) Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan Sarana dan Prasarana Transportasi yang Berkeselamatan

Melakukan kegiatan rekomendasi analisis kebijakan 10 (sepuluh) isu strategis dengan judul sebagai berikut:

1) Pengembangan Akses Jalur Kereta Api Menuju Pelabuhan dan Bandara
2) Evaluasi Kebijakan Mekanisme Slot Time Penerbangan
3) Kebijakan Implementasi Dryport untuk Distribusi Kopi di Provinsi Aceh
4) Kebijakan penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Udara
5) Kebijakan Kriteria Bandara Hub and Spoke untuk Optimalisasi Jaringan
6) Kebijakan Implementasi Remote Tower di Bandara Wilayah 3T
7) Kebijakan Penetapan Bandara Internasional Transit Hub dan Pusat Perawatan
8) Kebijakan DLKr dan DLKp Pelabuhan dan Alur Pelayaran
9) Kebijakan Dukungan Infrastruktur Pelabuhan di Kawasan Ekonomi

Khusus

10) Kebijakan Integrasi Moda di Bandara untuk Mendukung Pariwisata Nasional

Melakukan kegiatan rekomendasi kebijakan pembangunan transportasi (t-2)

1) Evaluasi Penyelenggaraan Bandar Udara Internasional di Indonesia;
2) Kebijakan Pemanfaatan dan Pemilihan Sistem Energi Alternatif sebagai Penunjang Operasi Bandara;
3) Perencanaan Penyiapan Ruang Udara di Wilayah Ibu Kota Negara;
4) Pengembangan Aerotropolis di Wilayah Sekitar Ibukota Negara Baru;

e) Administrasi Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan

1) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2) Penyusunan Laporan Tahunan
3) Penyusunan Perjanjian Kinerja Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2024
4) Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2024
5) Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Monitoring, Analisa, dan Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Lebaran
6) SPIP

f) Layanan Manajemen Keuangan

1) Pengelolaan BMN
2) Pengelolaan Ketatausahaan, Umum, dan SDM Penunjang Teknis Transportasi Udara

g) Administrasi Publikasi dan Kehumasan

1) Penerbitan Jurnal
2) Penyusunan Database

3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda mampu mengerjakan kegiatan analisis kebijakan. Dengan jumlah SDM analis kebijakan sebanyak 23 pegawai dengan beberapa staf dan tenaga honorer, maka SDM yang ada dinilai cukup efisien untuk mengerjakan kegiatan analisis kebijakan sebanyak 15 kajian tahun berjalan termasuk NSPK dan 6 kajian hasil pemanfaatan rekomendasi kebijakan

t-2. Efisiensi SDM yang ada juga didukung oleh keterlibatan pihak instansi/stakeholder dibidang transportasi, perguruan tinggi, dan lainnya yang dijadikan narasumber dalam setiap kegiatan analisis kebijakan sehingga kegiatan analisis kebijakan dapat berjalan dan dapat diselesaikan dengan baik.

3.4 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pada tahun 2023 adalah sebesar Rp21.532.113.181,00 Apabila dibandingkan dengan pagu anggaran sebesar Rp22.246.709.000,00 yang direvisi menjadi Rp21.554.223.000,00 maka daya serap adalah sebesar 99.89% yang dimana seluruhnya merupakan belanja barang.. Tingkat capaian daya serap anggaran Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dalam kurun waktu lima tahun terakhir ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Rencana Anggaran dan Realisasi Tahun 2018-2022

Tahun	Rencana Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Daya Serap (%)
2018	23.022.889.000	20.221.780.936	87,83
2019	22.368.010.000	22.082.895.855	98,73
2020	24.095.758.000	23.850.280.109	98,98
2021	21.024.286.000	20.706.646.148	98,49
2022	7.143.056.000	7.119.120.494	99,66
2023	21.554.223.000	21.532.113.181	99.89

Jika dilihat dari output fisik yang dihasilkan, penyerapan anggaran Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dapat dikatakan baik. Selama pelaksanaan anggaran tahun 2023, pengelola keuangan berusaha untuk melakukan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran agar dapat terealisasi dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

BAB IV
PENUTUP

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertangggungjawaban tertulis atas tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja pada Tahun 2023 serta sebagai langkah upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi. Pencapaian kinerja Pusat Kebijakan Sarana Transportasi telah menggunakan target berbasis outcome yang telah sesuai dengan konsep Rencana Strategis 2023 – 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan rincian table sebagai berikut.

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET
Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Badan Kebijakan Transportasi dalam Perumusan Kebijakan Transportasi	IKK 1	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (Tahun Berjalan)	%	85
	IKK 2	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (t-2)	%	38
	IKK 3	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (Tahun Berjalan)	%	85
	IKK 4	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (t-2)	%	32
Optimalnya Koordinasi perumusan kebijakan transportasi yang efektif	IKK 5	Presentase Perumusan Kebijakan Transportasi Yang Diselaraskan Pada Tahun Berjalan	%	100
Meningkatnya Birokrasi Badan Kebijakan Transportasi Yang Akuntabel	IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP Yang TeLKCrintegrasi	Level	3
	IKK 7	Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	84
	IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	88,2

	IKK 9	Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi	Nilai	81
	IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	76
	IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi	%	86
	IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	73

Kunci keberhasilan dalam pencapaian kinerja yaitu adanya implementasi manajemen kinerja yang baik melalui pengaturan kerjasama secara harmonis dan terintegrasi antara pimpinan dan pelaksana, serta pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal guna mencapai target kinerja. Pada Tahun Anggaran 2023, Pagu Anggaran Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda sebesar Rp21.554.223.000,00 maka daya serap adalah sebesar 99.89% yang dimana seluruhnya merupakan belanja barang dibandingkan dengan total anggaran.

4.2 Saran dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi pada Triwulan III Tahun 2023, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti di Tahun 2023 seperti :

1. Perlunya pembuatan sistem kontrol pelaporan dan kinerja serta dokumentasi secara digital dan online, untuk mendukung kegiatan strategis maupun untuk kegiatan rutin di luar penyusunan rekomendasi kebijakan.
2. Perlunya kontrol terhadap setiap tahapan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan, sehingga penyusunan rekomendasi kebijakan dapat dilaksanakan secara runut dan sesuai dengan tahapan tahapan yang telah di sepakati.
3. Perlu adanya pengendalian terhadap penyerapan daya serap, khusunya untuk kegiatan yang akan dibatalkan, atau untuk dilakukan penyesesuain judul kegiatan yang baru.

4.2.1 Perencanaan Kinerja

Untuk aspek perencanaan yang lebih baik maka kedepannya perlu memperhatikan beberapa hal, seperti:

1. Melakukan koordinasi dengan tim evaluator dan mempertimbangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya agar ketidaksempurnaan pada tahun sebelumnya dapat diminimalisir pada saat tahapan perencanaan;

2. Melakukan revisi terhadap dokumen perencanaan kinerja apabila terjadi perubahan lingkungan strategis;
3. Memastikan bahwa seluruh dokumen perencanaan selaras satu dengan yang lainnya;
4. Menyusun timeline pelaksanaan rencana kegiatan agar bisa berakhir tepat waktu dan tidak menumpuk di akhir tahun.

4.2.2 Pengukuran Kinerja

Hendaknya pengukuran kinerja dapat dilakukan setiap tahapan kegiatan untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja pada waktu tertentu (bulanan, triwulan atau semester), sehingga dapat disusun suatu rencana untuk pencapaian target sesuai dengan timeline yang telah disusun.

4.2.3 Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja membutuhkan dukungan data dan koordinasi dengan bagian/bidang lainnya terutama bagian keuangan, sehingga diharapkan peran aktif dan partisipasi bagian lain dalam memberikan bahan dan data dukung pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja dapat dipantau melalui grup WhatsApp sebagai sarana komunikasi. Perlu dukungan semua pihak dalam melakukan pelaporan kinerja terutama dengan aplikasi dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Bappenas.

4.2.4 Evaluasi Kinerja

1. Menambah dan meningkatkan kemampuan SDM Analis Kebijakan melalui bimbingan teknis, serta melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mengerjakan isu-isu strategis transportasi.
2. Dalam rangka menghadapi semakin tingginya tuntutan pelayanan jasa perhubungan, kualitas SDM yang handal perlu terus ditingkatkan dan dibarengi dengan peningkatan iklim kerja yang kondusif serta ketersediaan fasilitas penunjang yang mengikuti perkembangan teknologi, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pola pengembangan karier para Analis Kebijakan dan Jabatan Fungsional Tertentu lainnya.
3. Perlu harmonisasi antara Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda dengan stakeholder terkait maupun pemerintah daerah untuk pelaksanaan perumusan kebijakan, sehingga rekomendasi yang dikeluarkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Kementerian Perhubungan dan pihak-pihak terkait lainnya.

4. Perlu koordinasi antara bagian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran agar daya serap maksimal.
5. Perlu menjaga ritme konsistensi waktu pengerjaan tugas agar sesuai dengan *timeline* yang telah disusun pada saat tahapan perencanaan.

4.2.5 Capaian Kinerja

Capaian kinerja perlu terus ditingkatkan dan tepat waktu memberikan pelaporan kepada pimpinan agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mencapai target kinerja. Aplikasi yang saat ini tersedia dapat digunakan untuk melakukan monitoring capaian kinerja, oleh karena itu harus rajin melakukan update dan dijaga kualitasnya agar tidak terjadi masalah pada saat pengisian capaian kinerja.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Tahun 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET
SK 1	Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi Badan Kebijakan Transportasi dalam Perumusan Kebijakan Transportasi	IKK 1	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (Tahun Berjalan)	%	85
		IKK 2	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Transportasi (t-2)	%	38
		IKK 3	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (Tahun Berjalan)	%	85
		IKK 4	Persentase Pemanfaatan Rekomendasi Rumusan NSPK (t-2)	%	32
SK 2	Optimalnya Koordinasi perumusan kebijakan transportasi yang efektif	IKK 5	Presentase Perumusan Kebijakan Transportasi Yang Diselaraskan Pada Tahun Berjalan	%	100
SK 3	Meningkatnya Birokrasi Badan Kebijakan Transportasi Yang Akuntabel	IKK 6	Tingkat Maturitas SPIP Yang Terintegrasi	Level	3
		IKK 7	Indeks Perencanaan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	84
		IKK 8	Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	88,2
		IKK 9	Nilai SAKIP Badan Kebijakan Transportasi	Nilai	81
		IKK 10	Indeks Pengelolaan BMN Badan Kebijakan Transportasi	Indeks	76
		IKK 11	Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Badan Kebijakan Transportasi	%	86
		IKK 12	Indeks Penyelenggaraan Perkantoran	Indeks	73

Keterangan: IKK 2 dan 4 akan dilakukan perhitungan pada Tahun 2024

LAMPIRAN

PK Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda
Tahun 2023

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
Program Infrastruktur Konektivitas		
1.	Formulasi Kebijakan Transportasi	Rp18.900.451.000,00
Program Dukungan Manajemen		
1.	Pengelolaan Organisasi, dan SDM Perumus Kebijakan	Rp111.074.000,00
2.	Perencanaan Keuangan, SDM, dan Umum Perumus Kebijakan	Rp3.325.184.000,00
TOTAL		**Rp22.246.709.000,00**

Lampiran 2. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023